BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Hukum Pidana

Dalam menanggulangi tindak pidana dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur yang menggunakan sarana *penal* dan jalur yang menggunakan sarana *non penal*. Sarana *non penal* berdasarkan pendapat G. Peter Heofnagels yang dikutip Barda Nawawi Arief meliputi menanggulangi tindak pidana tanpa menggunakan hukum pidana dan menanggulangi tindak pidana dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tindak pidana dan ppidanaan melalui media massa.¹¹

Dalam penanggulangan tindak pidana, terdapat dua pendekatan utama, yaitu sarana penal dan sarana non-penal. Sarana penal berfokus pada penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan dan mencegah kejahatan dengan memberikan efek jera. Di sisi lain, sarana non-penal menawarkan pendekatan yang berbeda dengan tujuan yang sama, yakni mencegah dan mengurangi tindak pidana, namun tanpa menggunakan hukum pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, pendekatan non-penal mencakup metode untuk menangani kejahatan melalui pengaruh sosial dan budaya, termasuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindak pidana dan ppidanaan.

Salah satu cara dalam jalur non-penal adalah melalui penyebaran informasi dan edukasi menggunakan media massa untuk membentuk

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 46

pandangan publik tentang kejahatan dan konsekuensi hukumnya. Dengan begitu, pendekatan non-penal tidak hanya berupaya mencegah kejahatan melalui upaya penegakan hukum langsung tetapi juga mengedepankan pencegahan dengan cara mempengaruhi norma sosial dan perilaku masyarakat agar menghindari kejahatan.

Sarana *non penal* menitik beratkan pada sifat *preventif*, yakni pencegahan atau pengendalian sebelum tindak pidana itu terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur penal yang bersifat tindakan pencegahan sesudah tindak pidana itu terjadinya.

Ali Zaidan menyebutkan bahwa, kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem pradilan pidana dengan pendekatan penal, dapat pula dilakukan dengan sarana di luar hukum pidana (sarana non penal) dengan melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem pradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum dan pembaharuan hukum.¹²

Li Zaidan menekankan bahwa kebijakan 23olistic tidak hanya terbatas pada pendekatan represif yang dilakukan melalui 23olist peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan penal, tetapi juga dapat dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana (sarana non penal). Pendekatan non penal ini penting untuk memahami bahwa pencegahan kejahatan dan perlindungan 23olistic23t dapat dilakukan tanpa selalu melibatkan mekanisme hukum pidana.

¹² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*. Cet. ke-1. Malang: Sinar Grafika, 2016, hlm. 262.

1. Pendekatan Represif dan Penal

Dalam konteks kebijakan 24olistic, pendekatan represif mengacu pada 24olisti-langkah yang diambil untuk menanggulangi kejahatan setelah 24olistic 24olistic terjadi. Ini biasanya dilakukan melalui 24olist peradilan pidana, yang mencakup penegakan hukum, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Pendekatan ini menekankan pada penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana sebagai respons terhadap 24olistic 24olistic.

2. Sarana Non Penal

Sementara pendekatan penal berfokus pada aspek hukum dan sanksi, pendekatan non penal berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara yang lebih proaktif. Beberapa sarana non penal yang dapat diterapkan antara lain:

- Usaha Penyehatan Mental Masyarakat: Meningkatkan 24olistic24 mental dan kesejahteraan 24olistic24t merupakan 24olisti penting dalam pencegahan kejahatan. Program-program yang 24olis pada pengembangan mental, dukungan psikologis, dan pengurangan stigma terhadap masalah 24olistic24 mental dapat membantu mencegah individu terlibat dalam perilaku 24olistic.
- Penyuluhan Hukum: Edukasi hukum kepada 24olistic24t sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban hukum. Melalui penyuluhan hukum, 24olistic24t dapat memahami implikasi dari 24olistic mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Program penyuluhan yang menjangkau

berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja, dapat menjadi polis efektif dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan norma hukum.

- **Pembaharuan Hukum:** Kebijakan dan regulasi yang tidak relevan atau tidak efektif perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui pembaharuan hukum, diharapkan dapat menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan mampu mencegah terjadinya kejahatan secara efektif.

3. Perlunya Pendekatan Terpadu

Zaidan juga menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu yang menggabungkan kedua sarana, baik penal maupun non penal. Upaya penegakan hukum yang efektif perlu didukung oleh program-program pencegahan yang memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan edukatif. Dengan demikian, kebijakan masyarakat dapat lebih komprehensif dan dapat mengatasi akar permasalahan kejahatan, bukan hanya sekadar merespons setelah kejahatan terjadi.

Ali Zaidan menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: pendekatan penal (represif) dan pendekatan non-penal (preventif). Pendekatan penal menggunakan sistem peradilan pidana untuk menindak pelaku kejahatan melalui proses hukum yang bertujuan memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Sebaliknya, pendekatan non-penal berfokus pada upaya pencegahan kejahatan tanpa

melibatkan sistem peradilan pidana. Beberapa metode dalam pendekatan non-penal ini meliputi penyehatan mental masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai moral serta etika agar masyarakat terhindar dari perilaku menyimpang. Selain itu, penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban hukum serta konsekuensi dari tindakan kriminal, sedangkan pembaharuan hukum diperlukan untuk mereformasi peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara menyeluruh, kombinasi antara pendekatan represif dan preventif sangat diperlukan dalam kebijakan kriminal.

Oleh karena itu, pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi dinamakan upaya non penal yaitu upaya yang paling strategis dari segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materiil dan immateriil dari faktor-faktor kriminogen.¹³ Ini berarti bahwa, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan faktor penangkal tindak pidana atau faktor anti *kriminogen* yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Heru Permana menyebutkan, tindak pidana di samping ditanggulangi dengan kebijakan yang bersifat penal, jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Karena di samping Negara, masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 46.

perbaikan taraf hidup anggota masyarakat. Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan tindak pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada diluar kerangka proses peradilan pidana.¹⁴

Maka upaya non penal merupakan suatu pencegahan tindak pidana, dimana dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan non penal. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Sebagaimana yang dikatakan W.A. Bonger bahwa, dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif.

Bonger menyebutkan, pada dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah tindak pidana adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.¹⁵ Dapat ditarik garis besarnya, kebijakan non penal mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah tindak pidana karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari tindak pidana yaitu sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (*preventif*) terjadinya tindak pidana sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah tindak pidana.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 7.

¹⁵ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 167.

2. Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan norma-norma dan aturan-aturan untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kapan dan dalam situasi apa seseorang dapat dikenakan pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. Sanksi pidana diberlakukan untuk memperkuat ketaatan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan di luar ranah hukum pidana.¹⁶

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah komponen yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Hukum pidana berfungsi untuk menetapkan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan, dengan demikian, dilarang. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat untuk memahami batasan-batasan perilaku yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai sistem yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memahami batasan-batasan perilaku yang diharapkan dalam kehidupan sosial.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1983, hlm. 12

4. Pentingnya Hukum Pidana

Hukum pidana berperan sebagai dasar untuk menjaga ketertiban dan keamanan ²⁹olistic²⁹t. Dengan adanya norma dan aturan yang jelas, ²⁹olistic²⁹t dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Hal ini membantu dalam menciptakan kesadaran hukum di kalangan individu, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan harapan hukum dan sosial. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai pencegah terhadap perilaku yang menyimpang atau merugikan orang lain.

Hukum pidana memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan ²⁹olistic²⁹t. Dengan menetapkan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi yang menyertainya, hukum pidana berfungsi sebagai alat ²⁹olisti sosial yang efektif. Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel “Mengenal Secara Lebih Jauh Tujuan Hukum Pidana”, hukum pidana diciptakan untuk membuat para pelaku kejahatan merasa jera agar tidak melakukan ²⁹olistic yang sama di kemudian hari.

Selain itu, hukum pidana berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan kepentingan umum. Dengan mengatur perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya, hukum pidana memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia,

dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, hukum pidana berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan menetapkan norma-norma perilaku yang harus dipatuhi, hukum pidana memberikan panduan tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Hal ini membantu membentuk perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, sehingga tercipta harmoni sosial.

Penerapan hukum pidana juga berperan dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, hukum pidana berupaya memulihkan kerugian yang dialami korban dan memberikan rasa keadilan. Selain itu, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, sehingga mencegah terjadinya aksi balas dendam yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Dalam konteks penegakan hukum, hukum pidana memberikan kerangka kerja bagi masyarakat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang ditetapkan, masyarakat penegak hukum dapat bertindak secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang.

Secara keseluruhan, pentingnya hukum pidana terletak pada kemampuannya dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, memberikan keadilan bagi korban, serta membimbing perilaku

individu agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana menjadi *31olistic31t* vital dalam menciptakan *31olistic31t* yang aman, tertib, dan berkeadilan.

5. Identifikasi dan Penegakan Peraturan

Salah satu fungsi utama hukum pidana adalah identifikasi perbuatan yang dilarang. Melalui undang-undang pidana, perbuatan-perbuatan tertentu seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan didefinisikan dengan jelas dan diberikan sanksi yang sesuai. Proses penegakan hukum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk *31olisti* penegak hukum, pengadilan, dan *31olisti* masyarakat. Hukum pidana menjadi alat untuk menegakkan keadilan, di mana pelanggar hukum dapat diadili dan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6. Peran Edukasi Hukum

Selain sebagai alat penegakan hukum, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi *31olistic31t*. Melalui pemahaman hukum pidana, *31olistic31t* dapat belajar tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Pendidikan hukum ini penting untuk membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga *31olistic31t* lebih mampu berpartisipasi dalam proses hukum dan mengambil *31olisti*-langkah yang tepat dalam menghadapi masalah hukum.

7. Batasan Perilaku Sosial

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang *31olisti* perilaku yang dapat diterima dalam *31olistic31t*. Dengan mengetahui

konsekuensi dari 32olistic mereka, individu diharapkan dapat membuat 32olistic32 yang lebih baik dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini penting dalam menciptakan 32olistic32t yang harmonis dan beradab, di mana norma-norma sosial dapat dijunjung tinggi.

a. Penetapan Norma dan Aturan

Hukum pidana mengatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan ini bisa beragam, mulai dari tindakan ringan, seperti pelanggaran lalu lintas, hingga kejahatan berat, seperti pembunuhan. Melalui hukum pidana, norma-norma sosial yang dianggap penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat ditetapkan.

b. Sanksi Pidana

Salah satu aspek kunci dari hukum pidana adalah adanya sanksi yang mengancam bagi setiap pelanggaran norma yang ditetapkan. Sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya, yang semuanya dirancang untuk memberikan efek jera baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat luas. Dengan adanya sanksi ini, hukum pidana berupaya untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

c. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menentukan kapan dan dalam situasi apa seseorang dapat dikenakan pidana. Proses ini melibatkan penegakan hukum yang adil dan transparan, sehingga setiap individu yang

melakukan pelanggaran dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia pelaku kejahatan, yang mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil selama proses peradilan.

d. Ketaatan Terhadap Norma

Sanksi pidana yang diberlakukan bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mendorong masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum. Dengan menetapkan konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran, hukum pidana berperan dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

e. Integrasi dengan Sistem Hukum Lainnya

Hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berintegrasi dengan sistem hukum lainnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berinteraksi dengan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum tata negara. Misalnya, aspek-aspek tertentu dari hukum perdata dapat berhubungan dengan hukum pidana, seperti dalam kasus pencurian, di mana pelanggaran terhadap hukum perdata (hak milik) berujung pada penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, hukum pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menetapkan norma, mengenali perbuatan yang dilarang, dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. Melalui penerapan sanksi pidana, hukum pidana berusaha untuk memperkuat ketaatan masyarakat terhadap

norma-norma hukum yang berlaku, dan dengan cara ini, menjaga ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat.

Pompe menjelaskan bahwa Hukum Pidana mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman, beserta ketentuan pidananya.¹⁷ Bambang Poernomo menambahkan bahwa Hukum Pidana dapat disebut sebagai hukum sanksi, di mana peraturan-peraturan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi untuk memperkuat norma-norma yang ada di luar domain hukum pidana.¹⁸ Definisi tradisional ini diakui sebelum perkembangan pesat hukum pidana.

Dari berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh negara, yang mencakup larangan dan kewajiban, dengan sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Larangan khusus dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau strafbaar feit.

a. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak perdagangan orang merupakan tindak pidana yang sangat sulit diberantas. Di masyarakat internasional TPPO disebut sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut mempengaruhi berkembangnya modus tindak pidana perdagangan orang.¹⁹ Persoalan tindak pidana perdagangan orang ini pun telah

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1983, hlm. 12

¹⁸ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 2

¹⁹ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

menyita perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang juga berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengeluarkan protokol PBB untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang baik yang dilakukan terhadap perempuan maupun terhadap anak-anak.

Berdasarkan sidang umum Perserikat Bangsa Bangsa pada Tahun 1994, mendefinisikan perdagangan orang sebagai pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan orang seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat tindak pidana.²⁰

Adapun di dalam protokol Perserikat Bangsa Bangsa pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi.

²⁰ Musfidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan*. Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 9

Eksplorasi yang dimaksud paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.²¹ Pengertian tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksplorasi yang dimaksudkan di dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

²¹ Farhana, *Op., Cit...*, hlm. 20.

mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.²² Sedangkan perekrutan yang dimaksud di dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, dan pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.²³

²² Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²³ Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.